

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI UNIT KERJA
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIAJUAN PAKAN TERNAK DENPASAR**



**BPTU-HPT DENPASAR
2020**

**RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI UNIT KERJA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DENPASAR
TAHUN 2020**

A. DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2. Tujuan Penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

I. Rencana Aksi Komponen Pengungkit

Indikator :

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
2. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang direncanakan.
2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Apel pagi setiap hari senin dan tanggal 17
2. Pelaporan LHKPN
3. Penandatanganan Pakta Integritas
4. Sosialisasi Pelaksanaan Budaya Kerja dan Pola Pikir.

II. Penataan Tatalaksana

Indikator :

- a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan Utama :
 1. Penetapan SOP
 2. Evaluasi/Perbaikan SOP (ditambahkan matriks rencana pelaksanaan)
- b. E-Office/e-government
 1. Implementasi sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi
 2. Implementasi sistem kepegawaian berbasis sistem informasi
 3. Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
 4. Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi
- c. Keterbukaan informasi publik
 1. Penerapan kebijakan tentang pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
 2. Monev Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Target :

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM.

III. Penetapan Sistem Manajemen SDM

Indikator :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 1. Penyusunan peta jabatan
 2. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja
 3. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerja
- b. Pola Mutasi Internal
 1. Kebijakan pola rotasi pegawai
 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
 3. Monitoring dan Evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal

- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - 1. Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Profesi (DIKLAT)
 - 2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi
- d. Penetapan Kinerja Individu
 - 1. Penetapan kinerja individu
 - 2. Pengukuran Kinerja Individu Secara Periodik
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode etik/Kode Perilaku Pegawai
 - 1. Distribusi Kode Etik (Menggunakan Surat Edaran)
 - 2. Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian

Pemutahiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala

Target :

- 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
- 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona ntegritas menuju WBK/WBBM
- 5. Meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WBK/WBBM

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Keterlibatan Pimpinan Rapat
 - 1. Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan
 - 2. Penyusunan Penetapan Kinerja
 - 3. Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - 1. Penyusunan dokumen perencanaan
 - 2. Penyusunan Laporan Kinerja

Target

- 1. Meningkatkan kinerja pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
- 2. Meningkatkan akuntabilitas Instansi pemerintah

V. Penguatan Pengawasan

- 1. Pengendalian Gratifikasi
 - a. Pembentukan Tim UPG
 - b. Pelaporan UPG

2. Penerapan SPIP
 - a. Pembentukan Tim Satlak PI
 - b. Sosialisasi SPI
3. Pengaduan Masyarakat
 - a. Pembentukan Tim Dumas
 - b. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Dumas
 - c. Tindak Lanjut Penanganan Dumas
4. Penanganan Benturan Kepentingan
 - a. SK Benturan Kepentingan
 - b. Sosialisasi Benturan Kepentingan
 - c. Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan
 - d. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan
 - e. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Standar pelayanan
 1. Reviu SOP Standar Pelayanan
- b. Budaya Pelayanan Prima
 1. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
 2. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan.
- c. Penilaian Kepuasan Pelayanan
 1. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
 2. Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Target :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, mudah) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar
2. Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Denpasar, 6 Januari 2020

Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak Denpasar



Ir. Junaida

NIP. 196308241989032002

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020

Kode	Kegiatan	Pelaksanaan Program Zona Integritas Tahun 2020											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
I	MANAJEMEN PERUBAHAN												
1.	Tim Kerja												
2.	Dokumen Rencana Pembangunan ZI												
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBK												
a.	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI												
b.	Monev Pembangunan Zona Integritas												
c.	Tindak Lanjut Hasil Monev												
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja												
a.	Apel pagi hari Senin dan Upacara 17												
b.	Pelaporan LHKPN												
c.	Penandatanganan Pakta Integritas												
d.	Sosialisasi KKPID (Pemasangan Banner)												
e.	Sosialisasi Pelaksanaan Budaya Kerja dan Pola Pikir												
II	PENATA TATALAKSANA												
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP)												
a.	Penetapan SOP												
b.	Evaluasi SOP												
2.	E-office/E-government												
a.	Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi (LAKIP, SMART, SIMPONI, Aplikasi Ruminansia, UPSP)												
b.	Implementasi Sistem Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi												
c.	Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi												
d.	Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi												
3.	Keterbukaan Informasi Publik												
a.	Penerapan Kebijakan Tentang Pelaksanaan Kinerja Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (SK PPID)												
b.	Monev Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik												

Kode	Kegiatan	Pelaksanaan Program Zona Integritas Tahun 2020											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
III	PENETAPAN SISTEM MANAJEMEN SDM												
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai												
a.	Penyusunan Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja												
b.	Penerapan Rencana Kebutuhan Pegawai Mengacu Pada Peta Jabatan dan Hasil Analisa Beban Kerja												
c.	Monev Penerapan Kebutuhan Pegawai												
2.	Pola Mutasi Internal												
a.	Kebijakan Pola Rotasi Pegawai												
b.	Penerapan Kebijakan Pola Mutasi Internal												
c.	Monitoring dan Evaluasi Atas Kebijakan Pola Mutasi Internal												
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi												
a.	Penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Profesi (DIKLAT)												
b.	Monitoring dan Evaluasi Atas Kegiatan Pengembangan Profesi												
4.	Penetapan Kinerja Individu												
a.	Penetapan Kinerja Individu												
b.	Pengukuran Kinerja Individu Secara Periodik												
c.	Penilaian Kinerja Individu Sebagai Dasar Pemberian Reward												
5.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai												
a.	Distribusi Kode Etik (Surat Edaran)												
b.	Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai												
6.	Sistem Informasi Kepegawaian												
a.	Pemutahiran Informasi Kepegawaian												
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS												
1.	Keterlibatan Pimpinan												
a.	Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan												
b.	Penyusunan Penetapan Kinerja												
c.	Pemantauan Pencapaian Kinerja Secara Berkala												
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja												
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan												
b.	Penyusunan Laporan Kinerja												

Kode	Kegiatan	Pelaksanaan Program Zona Integritas Tahun 2020											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
V	PENGUATAN PENGAWASAN												
1.	Pengendalian Gratifikasi												
a.	Pembentukan Tim UPG												
b.	Pelaporan UPG												
2.	Penerapan SPIP												
a.	Pembentukan Tim Satlak PI												
b.	Sosialisasi SPI												
3.	Pengaduan Masyarakat												
a.	Pembentukan Tim Dumas												
b.	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Dumas												
c.	Tindak Lanjut Penanganan Dumas												
4.	Penanganan Benturan Kepentingan												
a.	SK Benturan Kepentingan												
b.	Sosialisasi Benturan Kepentingan												
c.	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan												
d.	Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan												
e.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan												
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK												
1.	Standar Pelayanan												
a.	Reviu SOP Standar Pelayanan												
2.	Budaya Pelayanan Prima												
a.	Sosialisasi Penerapan Budaya Prima												
b.	Prosedur Pemberian Reward dan Panishment Bagi Pelaksana Layanan												
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan												
a.	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan												
b.	Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat												



6 Januari 2020

Kepala Balai

In. J. J. J.

NIP. 19630824 198903 2 002